



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

# **PENERAPAN SANKSI *ZINA MUḤṢAN* DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh:

**SUGIYANTO**  
**NIM. 58310102**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2012 M/1433 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## IKHTISAR

### Sugiyanto: “Penerapan Sanksi *Zina Muḥṣan* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”

Islam menjamin kebutuhan hidup manusia melalui syariat pernikahan, dengan pemenuhannya manusia bisa menjamin eksistensinya. Karena itu, dengan sangat keras Islam mengharamkan zina. Sanksi bagi pelaku zina sangat berat terlebih perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah (*muḥṣan*), maka pelakunya itu harus menerima hukum rajam sebagai konsekuensinya. Hukuman ini ditetapkan syara’ dengan cara dilempari batu sampai mati. Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran HAM oleh sebagian orang, baik dari kalangan orang muslim maupun non muslim, dan inilah yang menjadi objek kajian peneliti.

Permasalahannya adalah bagaimana konsepsi dasar *zina muḥṣan* meliputi sanksi pelaku *zina muḥṣan* dalam perspektif Islam, dan sanksi rajam bagi pelaku *zina muḥṣan* dalam pandangan HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi dasar *zina muḥṣan*, untuk mengetahui sanksi pelaku *zina muḥṣan* dalam perspektif Islam, serta untuk mengetahui sanksi rajam bagi pelaku *zina muḥṣan* dalam pandangan HAM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif atau kepustakaan (*bibliographie research*), yang secara total menggali pemikiran dari berbagai sumber pustaka sebagai dasar pemecahan masalah.

Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang data-datanya lebih bersifat deskriptif yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau rangkaian kalimat, sesuai dengan permasalahan yang diteliti cenderung kontekstual, setelah sebelumnya, data-data tersebut diperoleh melalui pendekatan normatif. Selain itu, dalam tahap ini data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dianalisis, namun lebih dulu melalui editing data, dan klasifikasi data, sehingga terlihat permasalahan yang akan diteliti.

Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan, bahwa *zina muḥṣan* (sudah menikah tetapi berzina) adalah contoh buruk bagi orang lain yang sudah menikah. Sebab *muḥṣan* termasuk kategori orang-orang yang terbentengi (beristeri/bersuami) yang mestinya tidak patut berzina (hubungan seksual yang diharamkan). Dalam Islam hukuman terpantas bagi pelaku *zina muḥṣan* adalah wajib dirajam, namun untuk bisa menerapkannya diperlukan alat bukti zina yang sah. Dalam pandangan HAM, hukum rajam dinyatakan sebagai bentuk penyiksaan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat diartikulasikan tergantung dari pada penerapan hukuman itu dilakukan, jika hukum rajam diberlakukan di nagara yang melegislasi syariat Islam, meskipun tidak terlepas dari tuduhan yang sama, tidak bisa dipersalahkan karena menjalankan syariat Islam, tetapi jika penerapan hukum rajam dilakukan dan kurang memperdulikan aturan hukum suatu negara, terlebih negara tersebut merupakan negara yang menjalankan segala sesuatunya berdasarkan undang-undang, maka penerapan hukum rajam menjadi problematik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI ZINA MUḤṢAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)”**. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keluarga, sahabatnya serta para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (A-AS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Slamet Firdaus, MA, selaku Dosen Pembimbing I penulis Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberi arahan, nasihat, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Bapak H. Edy Setyawan, Lc. MA, Dosen Pembimbing II penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan senantiasa menghendaki penulis membuat sesuatu yang lebih baik.
6. Civitas Akademika di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis usahakan secara maksimal, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, dengan penuh harap semoga skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan pembaca, khususnya bagi penulis. Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat penulis memanjatkan do'a kehadiran *illahi rabbī*, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT.

Cirebon, Juni 2012

Penyusun

**SUGIYANTO**  
**NIM. 58310102**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR ISI

IKHTISAR .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	ix
HALAMAN MOTTO .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Pemikiran .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	18
F. Sistematika Pembahasan .....	20

## BAB II. KONSEP DASAR DAN SANKSI *ZINA MUḤṢAN*

A. Pengertian <i>Zina Muḥṣan</i> .....	22
1. Definisi <i>Zina Muḥṣan</i> .....	22
2. Dasar Hukum dan Unsur <i>Zina Muḥṣan</i> .....	24
B. Sanksi <i>Zina Muḥṣan</i> .....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Rajam .....	29
2. Alat bukti dalam Penerapan Hukuman Rajam .....	37
C. Metode Pelaksanaan Hukuman <i>Pezina Muḥṣan</i> .....	40



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Tujuan Disyariatkan Hukum Rajam .....	45
--	----

### **BAB III. PARADIGMA HAM TERHADAP HUKUM ISLAM**

A. Pengertian HAM.....	48
B. Sejarah Perkembangan HAM.....	50
C. HAM dan Hukum Islam .....	59

### **BAB IV. RELEVANSI HUKUM RAJAM DENGAN HAM**

A. Hukum Rajam dan Perlindungan HAM .....	65
B. Hukum Rajam dalam Pandangan HAM .....	72
C. Upaya Penerapan Hukuman Rajam.....	78

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86

### **DAFTAR PUSTAKA**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam menetapkan beberapa parameter untuk mengukur sempurna tidaknya martabat hukum seseorang, di antaranya ialah parameter akidah dan harga diri. Dalam hukum Islam, harga diri dianggap sebagai sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Sebab, ia merupakan inti perbedaan antara manusia dengan binatang. Sehingga, perusakan harga diri akan berakibat sama dengan perusakan akidah atau kebutuhan pokok lainnya.<sup>1</sup>

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini bersifat orang seorang yang harus diperlakukan bukan hanya sekedar sebagai alat masyarakat semata, melainkan harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan manusia ini pula yang menjadi subyek kajian mendalam al-Qur'an yang paling utama.<sup>2</sup>

Patut pula dicatat bahwa syariah lebih mengutamakan kesejahteraan manusia ketimbang kebebasannya. Untuk itu, ada pula sanksi<sup>3</sup> tegas dari Allah yang harus dihayati dan diresapi oleh setiap orang beriman di mana pun adanya. Maka setiap tindakannya tidak akan dapat terlepas dari hukum. Ada beberapa

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam wacana dan agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 78. Selanjutnya ditulis Santoso, *Membumikan Hukum*.

<sup>2</sup> A. Rahman I. Doi, "Syariah The Islamic Law", diterjemahkan oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah: Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 13. Selanjutnya ditulis I Doi, *Penjelasan Hukum-hukum*.

<sup>3</sup> Sanksi adalah ancaman hukuman; merupakan salah satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 307. Selanjutnya ditulis Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*.



pembatasan dan sanksi hukum dari Allah yang berguna untuk membatasi ambisi dan hawa nafsu manusia. Hukum halal dan haram disebutkan secara jelas bagi umat Islam yang hidup dan tinggal bersama, begitu pun bagi non-Muslim. Bilamana masing-masing mereka melanggar pembatasan dan larangan hukum Allah, maka berarti ia telah melakukan perbuatan yang salah dan terkena dosa yang dapat dimasukkan ke golongan tindakan kriminal.<sup>4</sup>

Pembatasan diatas sungguh memberikan jaminan atas hak-hak orang seorang dan bangsa serta memberikan tanggung jawab kepada Allah, sekaligus kepada seluruh umat manusia. Ringkasnya, dalam setiap tindakan dan perilaku manusia yang berkaitan dengan hubungan antar sesamanya, selalu ada hukum Allah yang semata-mata memberikan sanksi syariah yang tegas bagi pelaku pelanggarannya.<sup>5</sup>

Dengan semakin rapatnya hubungan satu negara dengan negara yang lain di dunia ini, orang-orang di berbagai belahan bumi semakin merasa perlu untuk saling memahami budaya, sistem kehidupan, termasuk hukum dari bangsa-bangsa

---

<sup>4</sup> Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Bahkan di antara kedua batasan itu –halal dan haram– ada pula hal-hal yang belum jelas status hukumnya, *mutasyabihat*. Perkara yang belum jelas status hukumnya ini hendaknya dihindarkan dalam rangka menghindari tindakan yang berlebihan. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW. bersabda yang artinya, “*Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya ada perkara yang samar (syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menjaga dari perkara yang syubhat itu berarti telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Siapa yang jatuh melakukan yang syubhat itu berarti ia telah jatuh mengerjakan yang haram, ibarat penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekeliling tanah orang lain, lambat laun hewan ternak itu akan masuk ke tanah larangan itu. Ingatlah bahwa setiap raja itu mempunyai hukum larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah itu adalah apa saja yang diharamkan oleh-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging, apabila ia baik akan baiklah tubuh itu seluruhnya dan apabila ia rusak maka rusak semua tubuh manusia itu*” (HR. Muslim). Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihya al-Turās, t.t), juz 3, 1219. Selanjutnya ditulis Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan I Doi, *Penjelasan Hukum-hukum*, 15, serta Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1. Selanjutnya ditulis Ali, *Hukum Pidana Islam*.

<sup>5</sup> I Doi, *Penjelasan Hukum-hukum*, 16.





lain. Sehingga di Barat orang mempelajari berbagai aspek dari hukum Islam, tidak terkecuali hukum pidananya.<sup>6</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*.<sup>7</sup> Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqahā'* (ahli hukum Islam), perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya, *fuqahā'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqahā'* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman –*hudūd* dan *qīṣaṣ*– tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.<sup>8</sup>

Kemunculan kembali negara-negara Islam dan negara-negara Muslim di antara masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan ketaatan dari beberapa negara kepada hukum Islam sebagai dasar dari sistem hukum mereka menegaskan pentingnya memahami nilai-nilai dan atribut-atribut dari Islam dan hukum Islam.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil, 2001), cet. II, 15. Selanjutnya ditulis Santoso, *Menggagas Hukum*.

<sup>7</sup> *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis. Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 86. Selanjutnya ditulis Rosyada, *Hukum Islam*.

<sup>8</sup> Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarīmah*, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 1. Selanjutnya ditulis Djazuli, *Fiqh Jinayah*.

<sup>9</sup> Dalam tulisan ini negara muslim yaitu negara di mana mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin atau pemerintahnya mewakili mayoritas umat Islam. Sedangkan negara Islam merujuk kepada suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh perikelakuan dari seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek hukum Islam atau Syariah. Santoso, *Menggagas Hukum*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Abul A'la Maududi seorang pemikir dan pejuang Islam besar dari Pakistan menegaskan, bahwa Islam memberikan kepada manusia suatu pedoman yang jelas tentang sistem moral dengan menyatakan secara positif kebajikan-kebajikan apa yang dibolehkan dan kebatilan-kebatilan apa saja yang dilarang. Dengan berpegang pada pedoman ini, umat Islam dapat merencanakan program kesejahteraan pada segala zaman dan segala keadaan.<sup>10</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan tatanan yang dapat memelihara eksistensinya sehingga dapat memakmurkan dan memelihara dunia ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, manusia memerlukan tatanan yang dapat mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat terwujud keluarga dan masyarakat sesuai dengan kodrat dan fitrah manusia, tidak mengikuti kodrat dan tata kehidupan hewan.<sup>11</sup>

Cut Aswar dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer* menjelaskan, bahwa Allah SWT. menciptakan makhluk-Nya dengan cara berpasang-pasangan, termasuk manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Syariah.<sup>12</sup>

Prinsip tata hubungan laki-laki dan perempuan ini perlu diketahui dan dilaksanakan agar hubungan yang dilakukan sesuai dengan kodratnya sebagai

<sup>10</sup> Maulana Abul A'la Maududi, "Human Right in Islam", diterjemahkan oleh Bambang Iriana dan Djaja Atmadja, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 4. Selanjutnya ditulis Maududi, *Hak-hak Asasi*.

<sup>11</sup> Muhammad Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 10. Selanjutnya ditulis Thalib, *30 Petunjuk Pernikahan*.

<sup>12</sup> Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), jilid II, 45. Selanjutnya ditulis Aswar, *Problematika Hukum*.



manusia. Hal yang sangat membedakan antara tatanan kedua jenis makhluk yang disebut manusia dan hewan adalah syariat pernikahan.<sup>13</sup>

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>14</sup>

Lebih jelas Sayid Sabiq menyatakan, bahwa Islam menghendaki pernikahan, karena ia merupakan satu-satunya jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan naluri seksual (kebutuhan biologis). Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama (larangan zina).<sup>15</sup>

Hukum rajam dalam sejarah penerapan hukum Islam diproyeksikan sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan zina yang sudah pernah menikah (*muḥṣan*) atau *adultery*. Sementara bagi pelaku kejahatan zina yang belum pernah menikah (*ghair muḥṣan*) atau *fornication*, hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Thalib, 30 *Petunjuk Pernikahan*, 10.

<sup>14</sup> Beberapa penulis terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 7. Selanjutnya ditulis Sahrani, *Fikih Munakahat*.

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, "Fiqh Sunnah", diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid III, 303. Selanjutnya ditulis Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

<sup>16</sup> Chairul Fahmi dan Muhammad Siddiq, *Hukum Rajam*, (Banda Aceh: AJRC, 2009), 1. Selanjutnya ditulis, Siddiq, *Hukum Rajam*.



Diskursus mengenai penetapan hukuman rajam bagi pezina telah dimulai sejak berkembangnya ilmu hukum Islam. Hal tersebut terutama berkenaan dengan dalil dan landasan terhadap penetapan hukuman bagi pezina yang *muhṣan* didasarkan kepada hadis Nabi SAW. Namun, sebahagian ahli hukum lainnya menyatakan bahwa penerapan hukum zina didasarkan kepada dalil al-Quran surah an-Nūr ayat 2 dengan tanpa membedakan hukumannya, baik bagi pezina yang *muhṣan* maupun yang *ghair muhṣan*, yaitu dengan hukuman jilid (cambuk) seratus kali.<sup>17</sup> Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa penetapan hukuman bagi pezina yang *muhṣan* harus dirajam. Hal ini didasarkan kepada praktek dan sunnah yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw.<sup>18</sup>

Di masa kejahatan telah menjadi momok yang menakutkan, hukum pidana Islam terbukti dapat menjadi terapi.<sup>19</sup> Hal ini tidak dapat disangkal bahwa syariat Islam mampu memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral.<sup>20</sup> Kendati demikian, dalam masalah perzinaan hukum Islam telah dikritik habis-habisan karena campur tangan yang terlampau jauh dalam urusan pribadi, urusan tempat tidur individu-individu. Mereka memandang tidak adil terhadap masalah ini.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> *Muhṣan*, yakni orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, sudah pernah campur dengan jalan yang sah. Dan yang bukan *muhṣan*, yaitu tidak mencukupi syarat-syarat *muhṣan*, seperti gadis dan bujang pada lelaki. Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, "Kifayatul Akhyar", diterjemahkan oleh Syarifuddin dan Mishbah Musthafa, *Kifāyatul Akhyār*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), jilid II, 366. Selanjutnya ditulis Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*.

<sup>18</sup> Siddiq, *Hukum Rajam*, 2.

<sup>19</sup> Beberapa bulan setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang menegakkan syariat Islam, perampokan yang memenuhi jalan-jalan di tengah padang pasir dapat dibersihkan total dalam kurun waktu dua puluh lima tahun, tercatat hanya enam belas kali pelaksanaan hukuman potong tangan (sanksi *ḥadd* atas kasus perampokan). Santoso, *Membumikan Hukum*, 89.

<sup>20</sup> Sejak pertama syariat Islam lebih memainkan perannya untuk setiap masalah selalu berupaya membawa nilai-nilai moral. Sebaliknya *man made law* tidak memiliki kepentingan khusus terhadap moral, sepanjang perbuatan immoral seorang manusia tidak membahayakan orang lain atau merugikan keamanan dan ketentuan orang lain, *man made law* tidak meminta tanggung jawab. Santoso, *Menggagas Hukum*, 79.

<sup>21</sup> Santoso, *Menggagas Hukum*, 85



Banyak orang –termasuk di kalangan orang muslim sendiri– yang menentang keras pemberlakuan syariat Islam oleh negara. Berbagai alasan mereka kemukakan.<sup>22</sup>

Isu-isu kontemporer yang berkembang dalam bidang sosial kemasyarakatan belakangan ini cukup banyak yang menyita perhatian dan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Islam salah satu diantaranya adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Terhadap isu tersebut, perdebatan yang sering muncul berkisar antara kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Di samping itu, lahirnya ide-ide tersebut juga memberikan tantangan yang tidak sederhana bagi masyarakat Islam, baik dalam tataran konseptual maupun praktek.<sup>23</sup>

Terdorong oleh kenyataan, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat hal tersebut sebagai pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Atas dasar pemikiran tersebut maka skripsi ini penulis beri judul **“Penerapan Sanksi *Zina Muḥṣan* dalam Perspektif HAM”**

## B. Perumusan Masalah

Fokus kajian pada bagian ini tertuang kedalam bagian sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian adalah konsenterasi keilmuan yang melingkupi tema kajian. Oleh karena pembahasannya menyangkut sanksi *zina muḥṣan*

<sup>22</sup> Adian Husaiani, *Rajam: Dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 83. Selanjutnya ditulis, Husaini, *Rajam*.

<sup>23</sup> Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2008), 37. Selanjutnya ditulis Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah*.





dalam perspektif HAM. Maka wilayah kajiannya termasuk kepada fiqih jinayah atau hukum pidana Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan topik skripsi ini yang cenderung kontekstual, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah pendekatan normatif atau kepustakaan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah disini adalah adanya ketidakjelasan tentang sanksi *i'dām* (hukum bunuh) bagi pelaku *zina muḥṣan* dalam hukum pidana Islam yang mengharuskan hukuman dalam bentuk paling keras yakni rajam (dilempari batu) sampai mati. Apakah hukuman tersebut termasuk salah satu bentuk hukuman yang melanggar HAM atau merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasannya terarah, maka masalahnya perlu dibatasi berkisar pada pandangan HAM terhadap hukum rajam yang menjadi sanksi bagi pelaku *zina muḥṣan*.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana konsepsi dasar *zina muḥṣan*?
- b. Bagaimana sanksi pelaku *zina muḥṣan* dalam perspektif Islam?
- c. Bagaimana sanksi rajam bagi pelaku *zina muḥṣan* dalam pandangan HAM?



## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui konsepsi dasar *zina muḥṣan*.
- b. Untuk mengetahui sanksi pelaku *zina muḥṣan* dalam perspektif Islam.
- c. Untuk mengetahui sanksi rajam bagi pelaku *zina muḥṣan* dalam pandangan HAM.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam dunia hukum pidana, lebih khususnya mengenai hukum pidana Islam, serta dapat menambah refferensi dalam bidang hukum pidana Islam.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif tentang hukum pidana Islam. Lebih jauh lagi agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui, serta mampu mengkaji hukum pidana Islam yang kaitannya dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia disamping dapat melindungi Hak-hak Asasi Manusia.

#### c. Kegunaan Akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



#### D. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini agar dapat memakmurkannya. Hal itu tidak akan tercapai dengan sempurna kecuali jika jenis makhluk ini tetap ada dan bertahan hidup. Agar semua itu dapat berjalan dengan baik, Allah menciptakan sejumlah insting (naluri) dan dorongan nafsu yang menggiring manusia kepada berbagai hal yang menjamin eksistensinya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Islam membina kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tenteram melalui perkawinan, dengan peraturan-peraturan yang cukup rinci, baik melalui al-Qur'an maupun hadis.<sup>25</sup> Para ulama dalam hal ini telah memberi penjelasan-penjelasan, sehingga tidak ada lagi kekaburan-kekaburan di dalamnya. Untuk menjaga masyarakat tetap utuh dan damai, Islam melarang zina dengan hukuman bagi pelanggarnya karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Allah SWT dengan tegas melarang zina dengan firman-Nya:<sup>26</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>24</sup> Bertahan hidup, dimaksud adalah ia (manusia) bertanam, berindustri, membangun, memakmurkan dan sekaligus menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dengan sejumlah instingnya, diantaranya insting mencari makan, yang dengan pemenuhannya manusia bisa bertahan. Sedangkan insting lainnya adalah insting seksual yang berfungsi mempertahankan spesies manusia dengan diikat tali pernikahan yang mewujudkan keluarga yang membangun perasaan sosial yang luhur, berupa cinta dan kasih sayang. Sebaliknya jika tidak ada keluarga tentu tidak terbentuk suatu masyarakat. Yusuf Qardhawi, "Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam", diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dkk., *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), cet. IV, 213. Selanjutnya ditulis Qardhawi, *Halal Haram*.

<sup>25</sup> Anjuran menikah dan perintah pelaksanaan pernikahan, dalam firman-Nya: "*nikahilah sebagian wanita yang baik-baik yang kamu senangi*". (QS an-Nisā'/4:3), selain perintah ini, Rasulullah saw juga menganjurkan para pemuda yang telah dewasa untuk menikah: "*Hai para pemuda! Siapa saja di antara kamu yang sudah mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa.*" Karena puasa itu menjadi perisai baginya." (HR. Muslim). Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 2, 1018, dan Departemen Agama, *Al-Quran*, 115, serta Aswar, *Problematika Hukum Islam*, 45.

<sup>26</sup> Aswar, *Problematika Hukum Islam*, 48.



“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS al-Isrā’/17: 32)<sup>27</sup>

Larangan diatas diikuti oleh hukuman bagi pelaku zina sebagaimana tertera dalam firman-Nya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS an-Nūr/24: 2)<sup>28</sup>

Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini disandarkan pada hadis Nabi SAW.<sup>29</sup>

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَقِي سَنَةً وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah menikah yang berzina dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu.” (HR. Muslim Abu Dawud dan Tirmizi)<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 429. Selanjutnya ditulis Departemen Agama, *Al-Quran*.

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Al-Quran*, 543.

<sup>29</sup> Santoso, *Membumikan Hukum*, 24.

<sup>30</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3, 1316.



Dalam Islam sebuah pernikahan yang sah secara hukum bertujuan, selain untuk membina rumah tangga juga menjadi tempat untuk melakukan hubungan seksual secara sah dan legal serta mendapat pahala. Dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan dorongan seksualnya secara alami dan dilindungi oleh hukum, serta beretika. Namun sebaliknya jika hubungan seksual dilakukan diluar ikatan perkawinan, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari hukum, dosa besar, merusak moralitas dan etika serta mendapat hukuman yang sangat berat.<sup>31</sup>

Hamka membuat definisi singkat tentang zina, yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Perbuatan zina yang dianggap hal biasa oleh masyarakat sekuler modern merupakan tindakan yang terkutuk dan dimasukkan ke golongan tindak kejahatan berat dalam tinjauan syariat Islam.<sup>32</sup>

Syariat Islam tidak hanya mencukupkan dengan ketetapan sanksi *i'dām* (hukum bunuh) untuk kasus zina yang dilakukan orang yang sudah menikah, namun syariat mengharuskan pelaksanaannya dalam bentuk yang paling keras, dengan tujuan menyiksa pelaku, yakni perajaman dengan menggunakan batu hingga si pelaku mati.<sup>33</sup> Orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) mendapat hukuman

<sup>31</sup> Siddiq, *Hukum Rajam*, 16.

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), cet. V, jilid VI, juz 15, 4047. Selanjutnya ditulis Hamka, *Tafsir al-Azhar*.

<sup>33</sup> Ketentuan hukuman rajam tersebut merupakan bentuk *jarīmah ḥudūd* yaitu perbuatan tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Selain hukuman yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis tersebut, Islam juga menerapkan bentuk *jarīmah ta'zīr*, yaitu perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelaku kejahatan. Siddiq, *Hukum Rajam*, 1, dan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "Maqāṣidusy Syarī'ah", diterjemahkan oleh Kuwais, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 136. Selanjutnya ditulis Jauhar, *Maqashid Syariah*.





yang lebih berat, yaitu hukuman rajam, karena biasanya *ke-iḥṣān*-an (pernah menikahnya) seseorang cukup menjauhkannya dari pemikiran tentang perbuatan zina. Akan tetapi jika ia masih saja memikirkannya, maka hal ini menunjukkan kuatnya birahi dan keinginan akan kenikmatan, dan oleh karena itu maka harus dijatuhi hukuman yang berat, sehingga ketika ia menginginkan *jarīmah* tersebut terbayang pula derita dan sengsara yang akan menimpa dirinya. Pelaku perbuatan *zina muḥṣan* merupakan contoh buruk bagi orang lain dan menurut syariat Islam contoh yang buruk tidak berhak hidup, karena syariat Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda.<sup>34</sup>

Agama dengan ketiga rukunnya, yakni Iman, Islam, dan Ihsan atau akidah, syariat, dan akhlak adalah murni diperuntukkan kepada umat manusia, tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan yang menurunkannya. karena itu, setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Dikalangan para ulama dikenal apa yang disebut *maqāṣidusy syarī'ah*, yaitu tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap lima hal yang menjadi tonggak keberadaan manusia, yakni agama (akidah), nyawa, akal, nasab atau harga diri, dan harta benda.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 268.. Selanjutnya ditulis Hanafi, *Asas-Asas Hukum*.

<sup>35</sup> Pernyataan ini merupakan penjelasan terhadap kebutuhan utama (primer) dalam tujuan hukum Islam atau kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu, aspek pembuat hukum Islam adalah Allah dan Nabi Muhammad, aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Pertama pembuat hukum Islam (Allah swt dan Nabi Muhammad saw) kaitannya dengan tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Dalam istilah fiqh disebut *ḍarūriyyāh*, *ḥājjiyyah*, dan *tahsīniyyāh*. Kedua pelaku hukum (manusia) kaitannya dengan tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkat kata untuk mencapai keridaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ali, *Hukum Pidana Islam*, dan Santoso, *Membumikan Hukum*, 76.



Satu kenyataan yang penting, bahwa negara-negara Islam seringkali mengalami tuduhan sebagai negara yang banyak melakukan pelanggaran HAM. Dengan sendirinya, secara implisit maupun eksplisit, tuduhan mengarah kepada ajaran Islam. Bahwa Islam adalah agama yang tidak memberikan perhatian dan perlindungan HAM.<sup>36</sup> Padahal, Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah penghancuran kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.<sup>37</sup>

Dalam masalah *jinayah*, khususnya tentang sanksi *zina muḥṣan* yang dalam perspektif HAM dapat dinilai kejam dan menghinakan. Pasal 5 Deklarasi HAM menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan, atau pun jalan perlakuan, atau hukum yang menghinakan.<sup>38</sup>

Di kalangan sarjana-sarjana hukum positif, diantaranya menentang dengan alasan, hukuman mati adalah hukuman yang kejam serta mengerikan yang mengingatkan kepada hukum rimba, dan menyatakan hukuman mati berlawanan dengan hak-hak yang dilindungi dan dipelihara.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah*, 38

<sup>37</sup> Jauhar, *Maqashid Syariah*, 131.

<sup>38</sup> David P Forsythe, *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, 333, seperti dikutip oleh Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 197. Selanjutnya ditulis Salikin, *Reformasi Syariah*.

<sup>39</sup> Hanafi, *Asas-Asas Hukum*, 300.

Hukuman yang bersifat fisik ini dinilai oleh aktivis HAM sebagai hukuman yang kejam dan tidak atau kurang menghormati kemanusiaan. Dilihat dari perspektif HAM, atau dari sudut pandang seseorang yang berada di luar sistem syariat Islam, *hudūd*<sup>40</sup> merupakan pelanggaran yang jelas terhadap larangan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Karenanya, dapat dikatakan bahwa ia bertentangan dengan HAM.<sup>41</sup>

Menurut Iqbal Siddiqi kritik-kritik Barat yang dilancarkan terhadap hukuman perzinaan bukan semata-mata karena tidak suka terhadap ide hukuman fisik, tetapi lebih pada perasaan moral (*moral sense*) mereka yang belum terbangun seutuhnya. Mereka memandang perzinaan sebagai sesuatu yang menyenangkan bagi kedua pelakunya dan sesuatu yang biasa serta bersifat pribadi. Mereka tidak memandang perzinaan sebagai kejahatan sosial yang akan mempengaruhi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka ingin agar hukum mentolerir perbuatan yang serius itu, kecuali ada paksaan. Sebagai konsekuensi pandangan ini, hukuman yang diancamkan oleh hukum Islam dianggap sangat kejam.<sup>42</sup>

Dari penelitian di negara-negara Barat hubungan seksualitas di luar nikah (*adultery* dan *fornication*), meskipun melanggar susila, bukan lagi urusan hukum pidana, kecuali perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan adanya unsur-unsur paksaan, kekerasan, tipuan, obat bius atau dilakukan terhadap anak di bawah

<sup>40</sup> Kata *hudūd* bentuk jamak kata dari *hadd*. Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 255.

<sup>41</sup> Ann Elizabeth Mayer, "Islam dan HAM: Lain Isu Lain Kontens" dalam *Dekonstruksi Syariah II*, 53, seperti dikutip oleh Salikin, *Reformasi Syariah*, 201.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1985), 35-36. Selanjutnya ditulis Iqbal Siddiqi, *The Penal Law*.





umur. Begitu pula dengan pelacuran. Meskipun ada aturan yang melarangnya, tetapi terutama hanya ditujukan bagi germonya saja atau yang memberi kesempatan untuk itu, bukan bagi yang melakukan secara fisik perbuatan itu yaitu pelacur dan pelanggannya. Falsafah yang digunakan untuk menjustifikasi hal itu bermacam-macam, tetapi yang sering terdengar adalah: biarkan hukum berhenti di depan kamar tidur.<sup>43</sup> Ungkapan ini seakan ingin mengatakan:

*“Biarkan hukum mengatur urusan-urusan umum saja, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan atau lainnya, sementara itu jangan biarkan ia mencampuri urusan pribadi seseorang. Bukankah urusan seksual, dengan siapa saja dilakukan adalah urusan pribadi? Janganlah terlalu mengekang hak-hak individu menikmati kehidupan pribadinya!”*

Dengan demikian, kerusakan moral yang melanda dunia barat justru karena diperbolehkannya perzinaan apabila dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan isterinya asal rela sama rela.<sup>44</sup>

Dalam perkembangannya, banyak orang ingin bebas sebebasnya, tanpa batas. Ketentuan agama juga dianggap sebagai halangan bagi manusia untuk bebas. Dalam lapangan seksualitas seperti di atas misalnya, ketentuan yang tegas dalam Islam melarang perzinaan, dipandang terlampau jauh masuk urusan pribadi orang lain. Dengan singkat kata, sistem *human rights* yang dikembangkan mencakup hampir secara total kehidupan manusia, tidak peduli sekalipun hal

<sup>43</sup> Santoso, *Menggagas Hukum*, 77-78.

<sup>44</sup> Dalam pernyataan ini, bahwa hukum positif malah menyediakan payung hukum untuk hubungan seksual di luar nikah apabila dilakukan dengan persetujuan bersama. Santoso, *Menggagas Hukum*, 79, dan Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 36.



itu berbahaya. Islam menolak ide seperti itu. Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada *divine sources* (al-Qur'an dan Sunnah). Jadi *human rights* menemukan fondasi yang kuat dalam teori hukum Islam.<sup>45</sup> Bahwa dalam hal ini, Islam sendiri menyatakan secara eksplisit sangat menghormati harkat manusia adalah jelas. Namun, dalam melihat manusia, al-Qur'an telah menggabungkan dua sisi yang bertolak belakang dari makhluk ini. Manusia dianggap sebagai makhluk yang sangat mulia, tetapi pada saat yang sama ia juga dianggap sebagai makhluk yang sangat hina.<sup>46</sup>

Kedua sisi yang bertolak belakang ini diperintahkan agar dipelihara secara seimbang. Ketika seorang manusia tidak bersalah, maka hak dan martabatnya dianggap suci dan harus dilindungi secara penuh. Karena manusia merupakan titipan Tuhan. Sebaliknya, ketika kesalahan seseorang sampai pada kejahatan *ḥudūd*, maka satu-persatu dari sendi-sendi kemuliannya itu runtuh, kemudian diperlakukan oleh hukum berdasarkan sisi kehinaannya. Dengan menggabungkan dua sisi manusia yang bertolak belakang itu, maka hukuman pidana Islam boleh saja dikatakan keras dan berat, tetapi kekerasan itu dijatuhkan kepada orang yang telah dilucuti martabat kemanusiannya. Maka, Tuhan bertindak dalam daerah kekuasaan-Nya sendiri. Jika Tuhan yang memberikan hidup, maka Tuhan pula yang mencabutnya, dan penerapan dari ketentuan-Nya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM, tetapi justru disitulah terdapat salah satu bentuk penegakan HAM.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Santoso, *Menggagas Hukum*, 94.

<sup>46</sup> Santoso, *Membumikan Hukum*, 76.

<sup>47</sup> Santoso, *Membumikan Hukum*, 77.





## E. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>48</sup> Maka dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang data-datanya lebih bersifat deskriptif. Dengan kata lain data yang akan dianalisis berupa deskriptif dari gejala-gejala yang diamati dan data yang terkumpul dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau rangkaian kalimat, sehingga tidak menekankan pada angka.<sup>49</sup>

### 2. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkenaan langsung dengan tema penelitian. Dengan kata lain, data tersebut diperoleh dari buku-buku utama, seperti Fiqh Jinayah, Fiqh Sunnah, HAM dalam Islam, Maqashid Syariah dan lain sebagainya.
- b. Data sekunder adalah data-data yang mendukung tema penelitian yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang memberikan penjelasan

<sup>48</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 17. Selanjutnya ditulis Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 9. Selanjutnya ditulis Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

mengenai data primer, atau bahan pustaka yang mengacu, mengutip bahan dari pada data primer yang diperoleh dari buku-buku hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, seperti Hukum Rajam, Reformasi Syariah, Ensiklopedi, Kamus (hukum), dan literatur-literatur kepustakaan lainnya yang mendukung tema penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*bibliographie research*), maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya yaitu dengan cara memilih dan menelaah terlebih dahulu literatur-literatur yang ada atau yang tersedia, mengumpulkannya, mencatat sebagian data yang diperlukan untuk memudahkan mengumpulkannya kembali pada tahap berikutnya. Data yang sebelumnya telah terkumpul dan tercatat sebagian kemudian kembali dikumpulkan untuk diringkas dan diklasifikasikan sesuai kerangka yang sudah direncanakan. Data-data dalam penelitian ini terutama diperoleh dari buku-buku yang menjadi sumber data primer sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian diikuti dengan data-data dari buku-buku pendukung (sekunder) yang menjelaskan tentang sanksi *zina muḥṣan* dan hak asasi manusia atau literatur-literatur lain yang terkait dengannya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari kepustakaan akan diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan: editing data, dan analisis data, dan klasifikasi data. Editing data dilakukan untuk mengetahui data-data mana saja yang berkaitan





dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya analisis dengan cara menghubungkan data dari variabel satu dengan variabel lainnya. kemudian diklasifikasikan yang dimaksudkan untuk memilah-milah data yang sesuai variabel, sehingga terdapat “benang merah” diantara variabel tersebut. Dengan demikian akan terlihat gambaran secara utuh dari permasalahan yang diteliti.

## F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan tema pembahasan yang ada pada skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** merupakan landasan pemikiran dari penelitian ini. Bagian ini memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** bagian ini menjelaskan tentang konsep *zina muḥṣan*; (definisi zina muḥsan, unsur-unsur zina, dasar hukumnya); sanksi *zina muḥṣan*; (pengertian rajam, sejarah hukum rajam, dasar hukum rajam, syarat pemberian hukuman dan alat pembuktiannya); metode pelaksanaan hukuman rajam; (pihak yang melaksanakan hukuman, tata cara pelaksanaan rajam, halangan pelaksanaan hukum rajam, dan tujuan disyariatkan hukum rajam).

**BAB III** pada bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian HAM, sejarah perkembangan HAM, HAM dalam pendekatan barat dan Islam (hukum pidana Islam).

**BAB IV** memaparkan analisis data tentang Islam dan HAM terhadap penerapan hukuman rajam bagi *pezina muḥṣan*, dengan tinjauan analisis prinsip-prinsip HAM dalam Islam.

**BAB V** bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bagian terakhir dari karya ilmiah ini. Kesimpulan ditarik dari analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, sementara saran menyesuaikan dengan hasil dan analisa dan pembahasan penelitian sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. “Kifāyatul Akhyār”.  
Terjemahan oleh Syarifuddin dan Mishbah Musthafa. *Kifayatul Akhyar*.  
Jilid II. Surabaya: Bina Iman. 1993.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Alimi, M. Yasir. *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Qusyairī, Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya al-Turās, t.th.
- Aswar, Cut. “Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina”. dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (Ed.). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Firdaus 1997.
- Audah, Abdul Qadir. “at-Tasyrī’ al-Jinā’i al-Islāmy Muqāranan bi al-Qānūni al-Waḍ’i”. Terjemahan oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008.
- Aziz, Shekh Faishal bin Abdul. “Mukhtaṣar Nail al-Auṭar”, Terjemahan oleh Mu’amal Hamidy dkk. *Himpunan Hadis-hadis Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra. 1989.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 1996.
- Doi, A. Rahman I. "Syariah The Islamic Law". Terjemahan oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah: Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.
- Fahmi, Chairul dan Muhammad Siddiq. *Hukum Rajam*. Banda Aceh: AJRC. 2009.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Husaiani, Adian. *Rajam: Dalam Arus Budaya Syahwat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.
- Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Cet III. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Rusyd, Ibnu. "Bidayāh al-Mujtahid". Terjemahan oleh A. Hanafi. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid X. Jakarta: Bulan Bintang. 1997.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. "Maqāṣidusy Syarī'ah", Terjemahan oleh Kuwais. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009.
- Maududi, Maulana Abul A'la. "Human Right in Islam". Terjemahan oleh Bambang Iriana dan Djaja Atmadja. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

\_\_\_\_\_. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication Ltd.

1977.

Muladi, "HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana" dalam Muladi (Ed.),

*Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif*

*Hukum dan Masyarakat*. Cet. II. Bandung: PT Rafika Aditama. 2007.

Qardhawi, Yusuf. "Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam". Terjemahan oleh Wahid

Ahmadi dkk. *Halal Haram dalam Islam*. Cet. IV. Surakarta: Era

Intermedia. 2007.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*. Cet. VII. Bandung: PT Al-

Ma'arif. 1991.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada. 1996.

Rover, C. de. "To Serve To Protect: Human Rights Humanitarian Law for Police

and Security Force". Terjemahan oleh Supardan Mansyur. *To Serve To*

*Protect: Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada. 2000.

Sabiq, Sayid. "Fiqh Sunnah". Jilid III. Terjemahan oleh Nor Hasanuddin. *Fiqh*

*Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Salikin, Adang Djumhur. *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam*. Yogyakarta:

Gama Media. 2004.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam*

*wacana dan agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- \_\_\_\_\_. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil. 2001.
- Setiardja, A. Gunawan. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid IX. Jakarta: Lentara Hati. 2007.
- Siddiqi, Muhammad Iqbal. *The Penal Law of Islam*. Lahore: Kazi Publication. 1985.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2005.
- Thalib, Muhammad. *30 Petunjuk Pernikahan dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 2000.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Triono, Dwi Condro. *Ilmu Retorika untuk Mengguncang Dunia*. Yogyakarta: Irtikaz, 2009.
- ZTF, Pradana Boy. *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama. 2008.